

**Judul** : Mayoritas Anggota DPR Enggan Laporkan Kekayaan  
**Tanggal** : Rabu, 30 Januari 2019  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 2

# Mayoritas Anggota DPR Enggan Laporkan Kekayaan

KPK meminta masyarakat tidak memilih calon legislator inkumben yang tak melaporkan hartanya.

**Francisco Rosarians**

[francisco@tempo.co.id](mailto:francisco@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Dewan Perwakilan Rakyat tengah disorot gara-gara rilis Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan rendahnya tingkat kepatuhan wakil rakyat dalam melaporkan hartanya. Berdasarkan data KPK, hanya 115 orang atau 21,42 persen dari total 537 anggota DPR yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2018. Angka itu jauh di bawah dua lembaga legislatif lainnya, yakni Dewan Perwakilan Daerah 57,5 persen dan DPRD 28,77 persen.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo tak membantah laporan tersebut. Ia menyebutkan telah banyak fasilitas dan cara yang dirancang untuk memudahkan legislator melaporkan LHKPN. Salah satunya, kata politikus Partai Golkar ini, adalah menyediakan Klinik LHKPN

elektronik yang terletak di Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen. Bambang mengklaim dirinya sebagai anggota DPR yang rutin menyerahkan LHKPN. "Tidak perlu menunggu batas akhir. Lebih cepat lebih baik," dia mengungkapkan, kemarin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan tak ada alasan bagi anggota Dewan untuk tidak rutin

menyerahkan LHKPN. Menurut dia, sejak 2017, KPK dan DPR telah membuat sistem pelaporan elektronik. Anggota Dewan yang hendak melapor dapat mengakses form LHKPN dan mengirimkan data tersebut tanpa perlu mendatangi kantor KPK. Kedua lembaga, Saut mengimbuhkan, juga menyediakan klinik dan *call centre* yang siap membantu para legislator menyusun dan

menuntaskan data LHKPN saban tahun.

Dia menyarankan agar masyarakat memperhatikan ketaatan penyerahan LHKPN para inkumben yang maju dalam pemilihan legislatif 2019. "Sebaiknya pilih (calon legislator) yang lain saja," kata Saut kepada *Tempo*, kemarin. "LHKPN itu wajib."

Sebagaimana dilaporkan *Koran Tempo* edisi Selasa, 29 Januari 2019, sekitar 89 persen anggota DPR periode 2014-2019 kembali berlaga dalam pemilihan legislatif pada 17 April mendatang. Bisa dipastikan sebagian besar calon legislator inkumben ini termasuk dalam kelompok anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN 2018:

*Tempo* sendiri menemukan beberapa calon legislator inkumben yang tak melaporkan LHKPN tahun lalu. Di antaranya Fadli Zon dari Partai Gerindra, Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hetti-



Empat atlet panjat tebing memasang spanduk bertulisan "Berani Lapor Hebat" di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi lama, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.

fah Sjaifuddin dari Partai Golkar, dan Arsul Sani dari Partai Persatuan Pembangunan. Kader Partai Hanura yang pindah ke Partai NasDem, Dossy Iskandar, juga tercatat belum melaporkan kekayaannya.

Hingga berita ini ditulis, beberapa nama belum memberikan konfirmasi. Dossy menolak berkomentar karena sedang bersama masyarakat. Sedangkan Arsul mengklaim telah menunaikan kewajibannya dan berjanji akan menunjukkan bukti pelaporan LHKPN.

Sedikit berbeda, Fadli

Zon menilai wajar banyak anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN tahun lalu. Dia berujar bahwa aktivitas anggota DPR menjelang Pemilu 2019 semakin padat. Menurut dia, beberapa anggota DPR juga tak memiliki perubahan kekayaan yang signifikan dalam kurun satu tahun. "Tahun politik mana sempat (menyerahkan LHKPN)," kata Fadli. "Kalau tak ada perubahan signifikan, mau lapor apa? Masak datanya sama saja? Yang penting kan sebelum dan sesudah menjabat."

● ARKHELAUS WISNU